

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2020 menjadi tahun yang sangat memprihatikan karena tengah terjadi penyebaran virus Corona atau yang biasa disebut Covid-19. Virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Dan virus ini dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia tidak terkecuali di Indonesia. Virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia yang positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun (DetikNews, 2020). Untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang menyebar dengan cepat. Pemerintah Indonesia mengadakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dapat berdampak mematikan segala aktivitas para pelaku UMKM. Pemerintah sadar bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah tidak hanya membatasi aktivitas para pelaku UMKM, tetapi hampir berdampak kepada semua bidang usaha. Lamanya kebijakan yang diterapkan Pemerintah berupa PSBB yang berdampak mematikan berbagai aktivitas bisnis pelaku UMKM dan membuat nasib para pelaku usaha UMKM tidak pasti, sehingga dapat membuat UMKM yang sebelumnya bertahan dapat menutup usahanya.

Ketangguhan UMKM bertahan ditengah pandemi menjadi modal utama untuk membawa perekonomian nasional selamat dari krisis dan perlahan tapi pasti dapat pulih kembali. Pada saat krisis moneter 1998 dan krisis keuangan global tahun 2008, banyak perusahaan-perusahaan yang berskala besar menutup usahanya, tetapi pada saat itu UMKM mampu untuk menggerakkan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Ekspor UMKM naik sampai 35%. Namun, kini kondisinya jauh berbeda kala pandemi Covid-19 melanda Negara Indonesia. UMKM tak lagi tangguh, tidak dapat lagi diandalkan sebagai penopang perekonomian bangsa. Mulai menyempitnya kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik sandang maupun pangan. Sekalipun masih ada yang dapat bertahan, seperti para pedagang pasar yang menjual aneka pokok pangan dan yang beralih menjual Alat Pelindung Diri (APD), namun hanya sebagian kecil dari puluhan juta para UMKM (Investor.id, 2020).

Pada tahun 1998, ditengah krisis keuangan, UMKM menjadi penyelamat perekonomian nasional. Salah satunya yaitu Dolar Amerika Serikat yang menguat dapat memberi keuntungan bagi pelaku UMKM mengeksport produknya. Ekspor UMKM paling banyak furniture, hasil laut, pertanian, tambang, rempah meningkat hingga 350%. Akibat imbas dari adanya virus Corona membuat permintaan produk ekspor melemah. Menurunnya perekonomian global membuka kesempatan bagi pelaku UMKM nasional untuk menggantikan posisi produk pasar impor dalam negeri lebih besar. Misalnya saja buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan baku spare part yang impornya terganggu. *Opportunity* di UMKM adalah mensubstitusi produk impor, misal seperti buah, jamur, sayur, bahan baku

industri spare part karena impor terganggu. Jadi ini sebenarnya bisa disubstitusi oleh UMKM (Liputan6.com, 2020).

Ditengah pandemi virus Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia, pemerintah berusaha untuk memastikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tiap-tiap daerah tetap bertahan. Mengingat UMKM sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan yang ada di Indonesia, maka perlu dilakukan strategi dalam proses pemberdayaan pada sektor UMKM selama masa pandemi Covid-19. Dikarenakan banyaknya pengangguran, UMKM memiliki peran strategis yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja serta menjadi sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Perkembangan UMKM yang ada di Indonesia juga masih dihadapkan dengan berbagai persoalan yang ada. Seperti terkendala dengan strategi pemasaran, modal usaha, kurangnya inovasi hingga akses teknologi digital. Selain permasalahan teknis juga dikarenakan UKM ini masih belum bisa bersaing secara kompetitif dengan para pelaku ekonomi lainnya (Solang et al., 2019:3).

Pemerintah memberikan berbagai fasilitas insentif dan stimulus dengan total nilai Rp123,4 triliun untuk mendukung UMKM tetap bertahan selama masa pandemi Covid-19, seperti yang dikatakan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Victoria Simanungkalit yang dimuat dalam satu media masa, diungkapkannya sebagai berikut:

“Untuk mendukung UMKM tetap bertahan, lanjut Victoria, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas insentif dan stimulus dengan total nilai

Rp123,4 triliun. Angka tersebut dibagi dalam enam kebijakan stimulus. *Pertama*, subsidi bunga sebesar Rp35,2 triliun. *Kedua*, penempatan dana pemerintah di bank umum untuk restrukturisasi kredit sebesar Rp78,7 triliun. *Ketiga*, belanja imbal jasa penjaminan sebesar Rp5 triliun. *Keempat*, penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp1 triliun. *Kelima*, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB-Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1 triliun dan keenam insentif pajak PPh final UMKM DTP sebesar Rp2,4 triliun. Selain gelontoran insentif tersebut, pihaknya juga tengah menyiapkan cara agar UMKM dapat optimal menyerap alokasi belanja pemerintah, sekaligus menjaga tingkat permintaan untuk produk UMKM. Cara yang ditempuh antara lain pengadaan langsung secara elektronik. Pemerintah membuka pintu bagi UMKM masuk dalam sistem informasi kinerja penyedia khusus untuk UMKM bagi kegiatan pengadaan pemerintah senilai Rp50 juta hingga Rp200 juta”. tambah Victoria Simanungkalit, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). (Setiawan, Newsddtc.co.id, 26/06/2020).

Selain memberikan berbagai fasilitas yang insentif dan stimulus dengan total nilai Rp123,4 triliun, Pemerintah juga menyiapkan aplikasi ‘Bela Pengadaan’ untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai di bawah Rp50 juta. Aplikasi “Bela Pengadaan” tersebut berkolaborasi dengan aggregator UMKM seperti marketplace *e-commerce*. Pemerintah juga akan membuat katalog elektronik UKM atau e-katalog UKM yang sedang dalam proses pembuatan.

Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah UMKM yang sangat banyak, perkembangan UMKM yang cukup pesat di Provinsi Jawa Timur juga harus diimbangi dengan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Potensi kerugian UMKM di Provinsi Jawa Timur (Jatim) bisa mencapai 100 persen. Seperti yang dikatakan Ketua Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo) Jatim, Bambang Wahyuon, yang dimuat dalam satu media masa, diungkapkannya sebagai berikut:

“Adanya larangan mudik ini membuat hampir semua pusat oleh-oleh di Jatim tutup. Sehingga tidak ada omzet yang masuk. "Potensi kerugian total UMKM di Jatim saya kira sulit untuk dihitung karena data UMKM setiap dinas/kantor bisa berbeda. Namun bisa lihat bahwa saat ini pusat dan toko oleh-oleh tutup semua dan omzet tidak ada. Meski pusat oleh-oleh tutup, tetapi UMKM berusaha mencari cara menggenjot omzet terutama untuk produk makanan dan minuman di momen Ramadan yang lumayan masih ada peminatnya. "Usaha makanan olahan yang sudah jalan, baik sebelum Covid-19 dengan mempunyai produk yang berkualitas dan brand yang kuat ternyata masih bisa stabil, seperti produk camilan crispy berbahan coklat, dan produk makanan frozen”. tambah Bambang Wahyuon, Ketua Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo) Jatim. (Nugroho, Radarsurabaya.jawapos.com, 27/04/2020).

Hal tersebut membuat pelaku UMKM Jatim harus belajar untuk menjual produknya secara online. Setidaknya 80-100 persen UMKM beralih ke online, baik melalui media social seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp Group, terutama untuk produk fashion, aksesoris dan makan dan minuman. Hal ini menjadi perkembangan yang cukup menarik, karena banyak UMKM yang dulu tidak familier dengan online akhirnya beralih menggunakan online, dengan belajar meningkatkan kemampuannya dalam digital.

Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 Kecamatan dengan jumlah Desa atau Kelurahan sebanyak 353. Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diberi wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2016 Pasal 14 huruf c yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha

ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses serta penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk membuat Usaha Mikro di setiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo menjadi Usaha Mikro yang unggul. Usaha Mikro atau disingkat UM merupakan badan usaha perorangan yang sudah cukup berkembang, namun mempunyai sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. Usaha Mikro merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia dan keberadaan Usaha Mikro menjadi salah satu potensi bagi tiap-tiap daerah di Indonesia, tidak terkecuali Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Data dibawah ini menunjukkan jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro
1.	Balongsendo	72
2.	Buduran	61
3.	Candi	101
4.	Gedangan	52
5.	Jabon	6
6.	Krempung	30
7.	Krian	38
8.	Porong	34
9.	Prambon	21
10.	Sedati	29
11.	Sidoarjo	157
12.	Sukodono	59
13.	Taman	58

14.	Tanggulangin	33
15.	Tarik	6
16.	Tulangan	48
17.	Waru	50
18.	Wonoayu	23
Jumlah		878

Sumber: Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, diolah penulis, 2021

Data tabel diatas adalah data Usaha Mikro yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi Sidoarjo. Dari 154.891 Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hanya sekitar 878 pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Sidoarjo paling banyak yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Sementara Kecamatan Jabon dan kecamatan Tarik paling sedikit yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan PSBB yang diterapkan Pemerintah Indonesia sudah dijalankan di beberapa daerah-daerah, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi 18 kecamatan dari sebelumnya 14 kecamatan (Liputan6, 2020). Para pelaku Usaha Mikro tidak dapat membuka usahanya seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19, hal tersebut dikarenakan adanya PSBB, *social distancing*, hingga penutupan tempat. Hal ini tentunya berdampak serius bagi para pelaku Usaha Mikro, dikarenakan pendapatan yang mereka dapat sangat minim. Minimnya aktifitas masyarakat

Kabupaten Sidoarjo membuat perekonomian di wilayah Sidoarjo semakin turun. Berikut Omset Usaha Mikro dari tahun 2019-2020.

Tabel 1.2 Penurunan Omset Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Selama Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020

Omset Usaha Mikro Tahun 2019	Rp 52.655.995.901,00
Omset Usaha Mikro Tahun 2020	Rp 33.039.223.010,00
Total Penurunan Omset	Rp 19.616.772.901,0
Peresentase Penurunan Omset	37,25 %

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Dari tabel diatas terdapat penurunan Omset Usaha Mikro, omset yang sebelumnya sebesar Rp 52.655.995.901,00 tetapi pada saat pandemi tahun 2020 Omset Usaha Mikro tersebut turun menjadi sekitar Rp 19.616.772.901,0 atau mengalami penurunan sekitar 37,25 %. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada omset pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo.

Adanya wabah virus Covid-19 ini membuat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, harus melakukan strategi agar Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo mampu bertahan dan tidak sampai tutup, seperti yang dikatakan Kabid Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang dimuat dalam satu media masa, diungkapkannya sebagai berikut:

“Ada sejumlah cara yang mereka tempuh. Seperti melakukan geser usaha dan saling silang usaha. Geser usaha, yakni bila biasanya UM memproduksi kerajinan, tapi beralih usaha yang saat ini banyak dibutuhkan masyarakat

dalam masa pandemi Covid-19. Yakni memproduksi masker, alat pelindung diri (APD) atau jamu-jamu herbal untuk menjaga kesehatan daya tahan tubuh.” Kata Kabid Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Para UM Sidoarjo akan diberikan tambahan pengetahuan, supaya usahanya bisa lebih berkembang. “Misalnya dalam masalah pemasaran. Mungkin bila dulu pemasaran sekitar 75% dilakukan secara manual, dan online hanya 25%, kini di masa pandemi Covid-19 ini, yang mengharuskan physical distancing, mungkin bisa berbalik. Pemasaran produk online kini ini malah harus 75% dan pemasaran secara manual hanya 25% saja.” tambah Erna Kusumawati SP MM, Kabid Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. (Supriyatno, Harianbhirawa.co.id, 23/07/2020)

Pemerintah lokal juga berperan dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo, untuk melakukan pemberdayaan tersebut diperlukannya langkah-langkah strategis yang berkaitan dengan visi, misi dan sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ingin dicapai. Pemberdayaan Usaha Mikro perlu dilakukan secara optimal, berkesinambungan dan menyeluruh melalui pengembangan iklim yang kondusif, dukungan, perlindungan, pemberian kesempatan berusaha serta pengembangan usaha seluasnya. Sehingga dapat meningkatkan peran, kedudukan, dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. Adanya pandemi Covid-19 ini membuat rencana strategi yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalami perubahan. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM Koperasi, meningkatkan pemasyarakatan koperasi, meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi terutama dalam manajemen usaha koperasi berstandar nasional, meningkatkan akses penciptaan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha baru, meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna, meningkatkan

fasilitasi permodalan usaha dana bergulir, meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2020).

Menurut Ismawan (1995) dalam Prijono & Pranarka (1996:240) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari: pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat-guna. Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada para pelaku UMKM salah satunya didirikan klinik UMKM. Klinik UMKM dimaksudkan untuk mendampingi para pelaku UMKM agar dapat berkembang. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga memberikan dana bergulir bagi para pelaku UMKM. Dana bergulir dengan bunga yang cukup rendah tersebut dapat digunakan untuk penguatan permodalan usaha. Strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Usaha Mikro dengan melakukan geser usaha serta saling silang usaha selama masa pandemi Covid-19. Proses pemberdayaan dimaksudkan agar para pelaku Usaha Mikro tetap dapat menjual produknya di masa pandemi Covid-19. Dalam pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Usaha Mikro berupa pemasaran produk-produk Usaha Mikro melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Diharapkan motivasi dan melakukan pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar para pelaku Usaha Mikro dapat mempertahankan usahanya selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemberdayaan Usaha Mikro selama masa pandemi di

Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengambil judul: **STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO BINAAN DI MASA PANDEMI DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO.**

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Di Masa Pandemi Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Di Masa Pandemi Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dari ilmu yang didapatkan, serta sebagai wujud implementasi dari salah satu poin Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian.

2. Bagi Instansi

Memberikan saran sebagai masukan bagi pihak pihak yang berkepentingan seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Di Masa Pandemi Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian yang serupa dimasa mendatang.